



Pantau Pelanggaran, Ada CCTV di Malioboro

JOGJA—Untuk memudahkan pengawasan dan keamanan bagi para pengunjung, sejumlah titik di kawasan Malioboro akan dilengkapi dengan kamera *Close Circuit Television* atau CCTV.

Dijelaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Syarif Teguh, untuk tahap awal pihaknya baru menempatkan kamera CCTV tersebut di tujuh titik sepanjang Malioboro. Ketujuh CCTV yang dipasang, jelasnya, dilengkapi dengan teknologi *wireless* untuk memudahkan pemantauan.

Perangkat CCTV nantinya dipantau dari layar televisi *server* di kantor UPT Malioboro. Untuk kebutuhan pengadaan hingga pemasangan ketujuh CCTV berikut perangkat pendukung televisi, UPT Malioboro mendapatkan anggaran sekitar Rp90 juta dari APBD Perubahan 2012.

Syarif menambahkan, pemasangan CCTV di kawasan Malioboro itu tidak hanya ditempatkan di lokasi yang tinggi tetapi juga di tempat-tempat yang rendah. "Dengan pola seperti itu, maka kami bisa melihat jelas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Misalnya, pelanggaran membuang sampah dan parkir bahkan copet sekalipun, bisa kami awasi," kata Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (9/11).

Selain itu, UPT Malioboro juga membuat studio radio komunitas Malioboro. Beberapa pengeras suara (*speaker*) juga dipasang di sepanjang kawasan tersebut untuk memperdengarkan su-

ara gending-gending Jawa.

Disinggung soal kelanjutan penataan, ia mengatakan, UPT Malioboro bersama Dinas terkait akan melanjutkan pembongkaran taman pot *divider* dan penertiban reklame melintang dari perempatan Dagen ke selatan. Pembongkaran taman akan dilakukan di malam hari, agar lebih efektif dan tidak mengganggu jalan. "Sisa waktu yang ada, kami optimistis penataan lanjutan selesai tahun ini," tambah Syarif.

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPD-PK) Kota Jogja mengaku siap menertibkan reklame yang melintang dari perempatan Dagen hingga Titik Nol Kilometer. "Untuk tahap pertama, kami akan melayangkan surat imbauan kepada pengusaha di Malioboro untuk menurunkan reklame yang melintang dan tidak sesuai ketentuan," kata Kabid Pajak Daerah DPDPK Jogja, Tugiarto.

Dia memperkirakan, setidaknya ada sekitar 50 reklame yang melangar. Pelanggaran tidak hanya pada posisi reklame yang salah tetapi juga izin yang kadaluarsa. DPDPK telah menyiapkan anggaran Rp40 juta untuk pembongkaran paksa reklame yang melangar tersebut dengan melibatkan pihak ketiga.

"Jika menghendaki papan reklame kembali, pengusaha harus membayar biaya ganti pembongkaran. Kami berharap pengusaha dapat menurunkan sendiri, reklame yang melintang itu," pungkasnya. (Abdul Hamied Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 22 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005